



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RDPU PANJA PENINGKATAN LITERASI DAN TENAGA PERPUSTAKAAN
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI - PEMUDA DAN
OLAHRAGA - PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN
NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2023 – 2024.
Masa Sidang ke-	: I (Satu)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)
Hari/Tanggal	: 26 September 2023
Pukul	: 16.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Agenda acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Peluang dan tantangan literasi dan tenaga perpustakaan di Indonesia;2. Dukungan toko buku dan penerbit terhadap peningkatan literasi;3. Masukan dan rekomendasi kebijakan peningkatan literasi;4. Evaluasi implementasi UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Kebijakan keberadaan toko buku dan program sistem informasi perbukuan Indonesia)
Hadir Komisi X DPR RI	: 16 orang dari 31 orang Anggota Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: Arys Hilman (Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)) Nurkholis Ridwan (Sekretaris Umum IKAPI) Yodi Ibrahim (Wakil ketua Umum Bidang Kebijakan Perbukuan IKAPI) Rikki Lumban Tobing (Kepala Bidang Buku Pendidikan IKAPI)

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 16.34 WIB oleh **Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM.**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber dari Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) dan menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI.

II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

A. Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua Umum, Sekretaris Umum, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Perbukuan dan Kepala Bidang Buku Pendidikan dari Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) dan menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI yang menyampaikan beberapa poin utama antara lain: (bahan terlampir).

1. Penerbit mendorong peningkatan Gerakan Literasi dengan melakukan hal-hal diantaranya sebagai berikut:
 - a. Mendorong Literasi Sekolah dengan mewajibkan anak-anak sekolah dasar dan menengah untuk membaca buku yang mereka sukai setiap hari.
 - b. Pemerintah mendukung setiap kegiatan pengembangan minat baca yang diselenggarakan oleh industri maupun masyarakat (pameran buku, diskusi buku, pelatihan menulis, TBM, dll)
 - c. Tersedianya buku berkualitas dan aktualitas dengan harga murah untuk perpustakaan taman bacaan.
2. Penerbit buku bermutu dan menarik tidak dapat masuk ke sekolah dan perpustakaan karena keberatan dengan kebijakan HET yang menciptakan disparitas harga dengan buku umum.
3. Terkait wewenang pemerintah perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penulis perlu mengikuti perkembangan digitalisasi.
 - b. Perlu adanya penegakan hukum untuk mengatasi pembajakan buku.
 - c. Diperlukan perbaikan iklim perlindungan hak cipta yang lebih berpihak kepada pencipta.
 - d. Menindaklanjuti amanat UU untuk membuat peraturan pelaksana UU, peraturan Menteri, hingga perda dan peraturan kepala daerah tentang sistem perbukuan.

- e. Perlu perbaikan skema penentuan HET buku nonteks dan tidak membebankan tanggungjawab buku murah dan merata semata kepada penerbit.
 - f. Perlu penetapan harga buku digital yang menjamin kesinambungan usaha penerbit.
4. UU No. 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan baru mengatur hubungan antar pelaku perbukuan. Literasi hanya definisi, untuk itu perlu ada UU Literasi demi kualitas hidup bangsa, akses pengetahuan dan teknologi.
- B. Terhadap penjelasan dan masukan yang disampaikan narasumber, Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI berpandangan diantaranya sebagai berikut:
1. Mendorong Pemerintah agar menjaga eksistensi Toko Buku sebagai bagian dari ekosistem perbukuan nasional.
 2. Mendorong adanya koordinasi antara Kemendikbudristek RI dan Kemenparekraf RI untuk membangun literasi secara sehat.
 3. Meminta IKAPI untuk memberikan kajian dan data terkait hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pasal dan ketentuan yang belum terjalankan terkait perbukuan dan literasi, beserta argumennya dalam UU No. 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan.
 - b. Data Buku bermutu yang terhambat untuk dimanfaatkan Pemerintah karena kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET).
 4. Mendukung IKAPI memiliki inovasi dan kreatifitas untuk mendorong minat baca.
- C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU hari ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 18.43 WIB.

KETUA RAPAT

TTD

Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM